

Transformasi Kebijakan Kurikulum di Indonesia: Telaah Historis dan Perspektif Pendidikan Islam

Abdul Aziz Muslimin¹, Muhammad Taufiqul Hidayat², Zhalfa Luthfi Fauza³, Lilis Permata Sari⁴, Yuliawati Ningsih⁵

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

⁴ Universitas Muhammadiyah Makassar

⁵ Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: abdazizm@uin-alauddin.ac.id¹, hidayattaufiqul7@gmail.com², luthfifauza16@gmail.com³, lilispermatasari433@gmail.com⁴, yuliawatiningih63@guru.sd.belajar.id⁵.

Article History:

Received: 08 Juli 2025

Revised: 02 September 2025

Accepted: 22 September 2025

Keywords: *transformasi kurikulum, kebijakan pendidikan, pendidikan Islam, integrasi nilai, Kurikulum Merdeka.*

Abstract: *Artikel ini membahas transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia dalam lintasan historis dan menelaahnya dari perspektif pendidikan Islam. Perubahan kurikulum dari masa ke masa mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan upaya negara dalam merespons dinamika sosial, politik, dan globalisasi pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menghadapi tantangan seperti ketimpangan sumber daya, kurangnya kesiapan guru, dan lemahnya sistem evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif pendidikan Islam, kurikulum ideal tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik. Pendidikan Islam menempatkan tujuan pembelajaran pada terbentuknya insan kāmīl manusia paripurna yang seimbang antara intelektualitas dan iman. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional menjadi strategi penting untuk memperkuat karakter dan identitas bangsa. Integrasi ini dapat dilakukan melalui muatan lokal, pendidikan karakter berbasis akhlak, keteladanan guru, serta pendekatan lintas mata pelajaran yang bersifat tauhid-sentris. Artikel ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi kurikulum perlu didesain secara inklusif, progresif, dan berbasis nilai, agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar spiritual dan budaya bangsa*

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem pendidikan yang merefleksikan nilai, visi, dan arah kebijakan suatu bangsa. Di Indonesia, perubahan kebijakan

kurikulum tidak hanya mencerminkan dinamika internal dunia pendidikan, tetapi juga merepresentasikan respon negara terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan globalisasi. Sejak kemerdekaan, kurikulum di Indonesia telah mengalami serangkaian transformasi signifikan dari model sentralistik yang didominasi oleh kepentingan negara hingga pendekatan desentralistik yang menekankan otonomi sekolah dan pengembangan kompetensi peserta didik. Namun, transformasi ini tidak serta-merta menghasilkan perbaikan kualitas pendidikan secara merata, karena masih banyak tantangan yang muncul dalam implementasinya di lapangan.

Fenomena tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan realitas sosiokultural Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Di satu sisi, negara berkewajiban menciptakan kurikulum yang bersifat nasional, universal, dan sekuler dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi lain, tuntutan untuk merefleksikan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum nasional semakin menguat, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memainkan peran strategis sebagai landasan normatif dalam proses rekonstruksi dan evaluasi kurikulum nasional.

Urgensi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem kurikulum nasional bukan semata bentuk resistensi terhadap modernitas, melainkan sebagai strategi untuk menyeimbangkan antara tuntutan global dan kebutuhan lokal, antara kemajuan teknologi dan pemurnian akhlak. Perspektif pendidikan Islam yang menekankan konsep *insan kāmīl*, yakni manusia paripurna yang seimbang antara akal, hati, dan spiritualitas, memberikan kerangka konseptual yang kaya bagi pembentukan kurikulum yang holistik dan berorientasi jangka panjang (Al-Attas, 1980). Dalam pandangan ini, pendidikan bukan hanya proses akademik, tetapi juga spiritual dan moral yang berorientasi pada pembentukan karakter dan peradaban.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara historis transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa serta mengkaji kemungkinan rekonstruksi kurikulum nasional melalui perspektif pendidikan Islam. Fokus utama terletak pada evaluasi kritis terhadap implementasi berbagai model kurikulum (1947–2022), tantangan struktural dan kebijakan dalam penerapannya, serta strategi integratif yang dapat menyelaraskan tujuan pendidikan nasional dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini bersifat kualitatif-analitis dengan menekankan pada data historis, dokumen kebijakan, serta literatur akademik yang relevan, khususnya dalam 10 tahun terakhir.

Melalui kajian ini diharapkan terbentuk pemahaman yang komprehensif dan konstruktif mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih visioner, inklusif, dan transformatif, tanpa kehilangan akar identitas kultural dan spiritual bangsa. Transformasi kurikulum bukan sekadar soal isi dan metode, tetapi juga soal ideologi dan filosofi pendidikan yang mendasarinya. Dengan demikian, pendidikan Indonesia tidak hanya akan mampu bersaing dalam kancah global, tetapi juga tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh tradisi keilmuan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertumpu pada metode kajian historis dan normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk memahami secara mendalam proses transformasi kebijakan kurikulum dari waktu ke waktu dan mengkaji makna-makna yang terkandung dalam kebijakan tersebut, baik secara historis maupun dalam perspektif pendidikan Islam. Fokus penelitian ini tidak hanya pada peristiwa-peristiwa kebijakan secara kronologis, tetapi juga pada nilai-nilai filosofis dan ideologis

yang melandasi perubahan kurikulum nasional serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalamnya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen kebijakan resmi seperti naskah kurikulum nasional (1947–2022), peraturan pemerintah, serta panduan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Selain itu, digunakan pula sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan penelitian yang membahas kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, serta pemikiran pendidikan Islam, khususnya dalam lima tahun terakhir agar data yang digunakan tetap aktual dan relevan. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan kajian pustaka (*library research*), yang memungkinkan peneliti menelaah secara sistematis bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik kajian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah substansi dokumen dan literatur untuk mengidentifikasi pola perubahan, narasi ideologis, dan arah orientasi kurikulum dari masa ke masa. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan (kategorisasi) berdasarkan periode dan karakteristik kebijakan kurikulum, serta dimensi nilai Islam yang terkandung atau potensial untuk diintegrasikan. Peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami dan menafsirkan makna di balik konsep-konsep kebijakan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam, seperti konsep *insan kāmīl*, *ta'dīb*, dan nilai-nilai tauhid dalam struktur kurikulum.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi dokumen kebijakan, kajian akademik, dan pendapat pakar pendidikan Islam guna memastikan konsistensi dan validitas temuan. Selain itu, validasi teoritis juga dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip epistemologi Islam dan teori kurikulum modern sebagai dasar dalam menyusun sintesis dan kesimpulan penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan kajian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika transformasi kurikulum di Indonesia serta kontribusi yang dapat diberikan oleh pendidikan Islam dalam memperkaya arah dan substansi kebijakan kurikulum nasional



Gambar 1. Diagram Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Historis Kebijakan Kurikulum di Indonesia

1. Kurikulum 1947–1994: Kurikulum Berbasis Negara

Periode awal pasca-kemerdekaan Indonesia ditandai dengan lahirnya Kurikulum 1947, yang merupakan kurikulum nasional pertama dan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Kurikulum ini disusun dalam suasana kebangsaan yang masih hangat, dengan tujuan utama membentuk identitas nasional dan memperkuat semangat patriotisme. Oleh karena itu, muatan kurikulumnya sangat menekankan pada nilai-nilai moralitas, kebangsaan, dan kesadaran bernegara sebagai bekal utama dalam membangun karakter bangsa yang baru merdeka. Dalam kurikulum ini, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan rasa cinta tanah air.

Transformasi kurikulum selanjutnya terus terjadi pada era 1950-an hingga 1970-an dengan munculnya Kurikulum 1952, 1964, 1968, dan 1975, yang masing-masing membawa orientasi pragmatis sesuai konteks sosial-politik saat itu. Kurikulum 1952 menegaskan struktur yang lebih sistematis dan lebih banyak mengatur pembagian waktu untuk pelajaran tertentu. Sementara Kurikulum 1964 dan 1968 lebih menekankan pada pendidikan dasar sebagai sarana pembentukan warga negara produktif, stabilitas nasional, dan pembangunan ekonomi. Kemudian, Kurikulum 1975 muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kerja yang terampil, efisien, dan siap pakai dalam mendukung program pembangunan Orde Baru. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan instruksional yang terstruktur melalui rumusan Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK), menunjukkan orientasi pendidikan yang semakin teknokratis dan instrumental.

Kondisi tersebut berlanjut pada Kurikulum 1984 dan 1994, yang semakin menekankan pada efisiensi pembelajaran dan efektivitas penyampaian materi ajar. Khususnya, Kurikulum 1994 dirancang dengan semangat mempercepat proses pembelajaran melalui padatnya muatan mata pelajaran dan alokasi waktu yang ketat. Namun, kebijakan ini menuai banyak kritik dari kalangan praktisi pendidikan karena dinilai terlalu membebani siswa dan guru. Materi yang sangat padat menyebabkan tekanan dalam proses belajar-mengajar, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Kurikulum ini juga memperlihatkan dominasi negara dalam menentukan arah pendidikan tanpa memberikan cukup ruang bagi kreativitas guru maupun konteks lokal sekolah (Mulyasa, 2022).

Dengan demikian, kurikulum pada rentang 1947 hingga 1994 cenderung memiliki karakteristik yang sentralistik, didominasi oleh kepentingan negara, dan berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, baik dalam aspek ideologi maupun ekonomi. Meskipun berhasil memberikan arah dan stabilitas dalam sistem pendidikan nasional, model kurikulum berbasis negara ini belum memberikan cukup ruang bagi pendekatan yang kontekstual dan partisipatif.

2. Kurikulum 2004–2013: Kompetensi dan Otonomi Sekolah

Periode reformasi pendidikan pada awal tahun 2000-an ditandai dengan pergeseran paradigma pembelajaran dari pendekatan konten menuju pendekatan kompetensi. Tahun 2004 menjadi titik awal implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang dirancang untuk menjawab tantangan globalisasi serta menyesuaikan arah pendidikan Indonesia agar lebih berorientasi pada hasil belajar (*output*) daripada sekadar penguasaan

materi ajar. Kurikulum ini menekankan pada tiga domain utama kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan harapan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga adaptif dan terampil menghadapi dinamika kehidupan nyata. Namun dalam praktiknya, KBK menghadapi kendala serius, khususnya terkait pemahaman guru terhadap konsep kompetensi itu sendiri, serta minimnya pelatihan yang mendalam mengenai pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi.

Sebagai bentuk penyempurnaan, pemerintah meluncurkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, yang memberikan otonomi lebih luas kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mengembangkan dan menyusun kurikulumnya sendiri berdasarkan potensi lokal, kondisi siswa, dan kebutuhan masyarakat. KTSP didasarkan pada prinsip desentralisasi pendidikan, dimana sekolah memiliki keleluasaan merancang silabus, menentukan metode pembelajaran, serta menyusun sistem evaluasi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungannya (Sagala, 2010). Tujuan dari kebijakan ini adalah mendorong relevansi pendidikan dengan konteks lokal serta meningkatkan partisipasi aktif guru dalam proses perencanaan pembelajaran. Namun, dalam implementasinya, banyak sekolah terutama di daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang menyebabkan pelaksanaan KTSP tidak berjalan optimal. Guru sebagai ujung tombak pendidikan sering kali mengalami kebingungan dalam mengembangkan kurikulum secara mandiri karena kurangnya pelatihan teknis dan supervisi yang memadai.

Selanjutnya, pada tahun 2013, pemerintah kembali melakukan inovasi melalui Kurikulum 2013 (K13). Kurikulum ini dikembangkan untuk memperkuat integrasi antara pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif) secara seimbang dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dan pembelajaran tematik terpadu, khususnya di tingkat dasar, dengan harapan dapat melatih peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan analitis sejak dini. Selain itu, K13 juga memperkenalkan penilaian autentik, yaitu sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar, keterlibatan siswa, dan pengembangan karakter. Penilaian ini mencakup observasi, jurnal reflektif, unjuk kerja, dan portofolio siswa, yang bertujuan menciptakan sistem asesmen yang lebih holistik dan manusiawi (Kemendikbud, 2017).

Meskipun Kurikulum 2013 mendapat apresiasi karena pendekatan yang komprehensif dan berbasis karakter, pelaksanaannya juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah beban administratif guru yang meningkat, ketimpangan akses pelatihan implementasi kurikulum antara sekolah kota dan desa, serta ketidaksiapan sarana pembelajaran yang mendukung metode pembelajaran aktif. Namun demikian, kurikulum ini tetap menjadi fondasi penting dalam upaya membentuk peserta didik yang tidak hanya kompeten dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global.

3. Kurikulum Merdeka: Respons terhadap Krisis dan Tuntutan Zaman

Kurikulum Merdeka hadir sebagai langkah strategis pemerintah dalam merespons krisis pembelajaran yang semakin nyata akibat pandemi COVID-19, yang telah menyebabkan disrupsi besar dalam sistem pendidikan nasional. Penutupan sekolah dalam jangka panjang, keterbatasan akses teknologi, serta kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah telah menyoroti lemahnya ketahanan sistem pendidikan Indonesia dalam menghadapi situasi darurat. Dalam konteks inilah, Kurikulum Merdeka dikembangkan

dengan prinsip fleksibilitas, adaptivitas, dan relevansi, yang memungkinkan satuan pendidikan merancang proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, kapasitas guru, serta sumber daya lokal yang tersedia (Kemendikbudristek, 2021).

Salah satu ciri utama dari kurikulum ini adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa melalui kegiatan nyata dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan kreativitas dan kemandirian siswa, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan problem-solving kompetensi yang sangat penting di abad ke-21. Selain itu, Kurikulum Merdeka sangat menekankan pada penguatan karakter peserta didik melalui integrasi nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup enam dimensi utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kepekaan sosial yang tinggi.

Kebijakan ini juga memberikan otonomi luas kepada sekolah dan guru, termasuk dalam memilih perangkat ajar dan menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Hal ini menjadi perubahan signifikan dari pendekatan kurikulum sebelumnya yang cenderung seragam dan sentralistik. Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan sumber daya antardaerah, terutama antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, yang menyebabkan disparitas dalam akses terhadap pelatihan, perangkat ajar digital, serta fasilitas pembelajaran (Mulyasa, 2022).

Selain itu, kesiapan guru dalam memahami dan melaksanakan paradigma baru pembelajaran juga menjadi persoalan serius. Banyak guru masih terbatas dalam penguasaan metode pembelajaran diferensiasi, asesmen formatif, dan pengelolaan kelas berbasis proyek. Minimnya pelatihan yang menyeluruh serta kurangnya pendampingan profesional menyebabkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka berjalan secara tidak merata dan tidak optimal di banyak satuan pendidikan. Oleh karena itu, meskipun Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional dan mendorong inovasi, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten, ketersediaan sumber daya, serta penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah secara sistemik dan berkelanjutan.

B. Tantangan Implementasi Kurikulum

Transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia, meskipun dirancang untuk menjawab tantangan zaman, tetap dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Implementasi kebijakan kurikulum tidak semata-mata bergantung pada desain konseptual yang ideal, tetapi juga pada kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh dalam menerjemahkan ide-ide tersebut ke dalam praktik nyata di ruang kelas. Tantangan pertama yang paling krusial adalah rendahnya kesiapan tenaga pendidik, baik dalam aspek pedagogis, teknis, maupun mentalitas. Banyak guru masih kesulitan memahami dan mengaplikasikan pendekatan baru dalam Kurikulum Merdeka, seperti asesmen formatif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, serta minimnya pendampingan intensif yang dapat membantu guru melakukan transformasi praktik mengajar mereka secara menyeluruh (Kosasih, 2021). Sebagian guru pada akhirnya memilih kembali ke pola konvensional yang

lebih familiar, meskipun pendekatan tersebut tidak lagi sesuai dengan tuntutan kurikulum baru.

Tantangan kedua berkaitan dengan ketidakkonsistenan kebijakan kurikulum akibat pergantian rezim pemerintahan. Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa hampir setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan nasional atau pejabat di kementerian, maka arah kebijakan kurikulum pun ikut berubah. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian di tingkat pelaksana, seperti guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan, karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk memahami, mengevaluasi, dan menyempurnakan implementasi kurikulum yang sedang berjalan (Hadi, 2019). Akibatnya, proses pembelajaran di sekolah sering kali stagnan, tidak terarah, dan mengalami degradasi mutu karena kebijakan yang bersifat tambal-sulam serta tidak berkelanjutan. Kurikulum yang ideal dan progresif sekalipun akan sulit berhasil jika tidak didukung oleh konsistensi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan yang visioner.

Tantangan ketiga adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang substansial dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kurikulum. Dalam praktiknya, kegiatan evaluasi kurikulum lebih sering bersifat administratif dan kuantitatif, yang hanya menilai kelengkapan dokumen atau pemenuhan format tanpa menggali lebih dalam kualitas pembelajaran yang terjadi di ruang kelas. Monitoring yang demikian tidak mampu menangkap dinamika sebenarnya dalam implementasi kurikulum, seperti sejauh mana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, bagaimana guru menyesuaikan strategi pengajaran, serta bagaimana budaya belajar terbentuk dalam ekosistem sekolah. Padahal, evaluasi yang holistik dan reflektif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan umpan balik yang berguna bagi penyempurnaan kebijakan kurikulum secara berkelanjutan (Amka, 2020).

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada pembangunan sistem pendukung yang komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas guru, konsistensi arah kebijakan, hingga pembentukan budaya evaluatif yang sehat dan konstruktif. Tanpa penyelesaian atas tantangan-tantangan tersebut, reformasi kurikulum hanya akan berhenti pada tataran konsep dan dokumen, tanpa membawa perubahan signifikan terhadap kualitas pendidikan nasional.

C. Perspektif Pendidikan Islam terhadap Transformasi Kurikulum

Dalam khazanah pemikiran Islam, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya, atau dalam istilah Islam disebut *insan kāmīl*. Tujuan pendidikan Islam bukan semata mencetak individu yang unggul secara intelektual, melainkan juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang keseimbangan antara dimensi spiritual dan rasionalitasnya terjaga secara harmonis (Al-Attas, 1980). Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan pendidikan, termasuk transformasi kurikulum nasional, idealnya mencerminkan cita-cita luhur tersebut. Dalam Islam, pendidikan merupakan proses *tazkiyah* (penyucian jiwa) dan *ta'lim* (pengajaran ilmu), yang keduanya harus berjalan seimbang agar peserta didik tidak hanya memiliki kompetensi duniawi, tetapi juga kesadaran transendental akan tanggung jawabnya kepada Tuhan, sesama, dan alam semesta.

Lebih jauh, Imam Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam filsafat dan etika pendidikan Islam, menekankan bahwa kurikulum seharusnya menjadi jalan yang menuntun peserta didik kepada kedekatan dengan Allah SWT. Dalam pandangannya, ilmu yang ideal adalah ilmu yang bermanfaat secara praktis dan spiritual, yang tidak hanya memberi kemudahan dalam kehidupan dunia, tetapi juga membimbing manusia menuju keselamatan akhirat (Shihab,

2013). Artinya, setiap struktur kurikulum harus mencerminkan orientasi teosentris dan berbasis nilai-nilai ilahiyah, bukan semata-mata pada penguasaan kompetensi teknis atau capaian akademik.

Dalam konteks ini, transformasi kurikulum nasional di Indonesia, termasuk Kurikulum Merdeka, perlu dipertimbangkan secara kritis agar tidak tercerabut dari akar nilai-nilai Islam yang menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Pendidikan Islam tidak menolak modernitas dan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi menekankan pentingnya nilai moral, etika, dan spiritual sebagai fondasi utama dalam pembentukan manusia berkarakter. Oleh karena itu, kurikulum ideal dalam perspektif Islam harus mampu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan adab, baik melalui konten materi ajar maupun metode pembelajarannya.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan kurikulum bukan hanya tugas pendidikan keagamaan atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen pendidikan. Setiap mata pelajaran dapat menjadi media internalisasi nilai, apabila didesain dengan pendekatan transdisipliner dan disampaikan dengan metode yang mengedepankan keteladanan serta kesadaran spiritual. Dengan demikian, transformasi kurikulum di Indonesia akan benar-benar sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menyeluruh (*syamil*) dan mendalam (*tafaqquh*).

D. Integrasi dalam Kurikulum Nasional

Upaya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum nasional merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam hal moral, spiritual, dan karakter kebangsaan. Pendidikan yang ideal dalam pandangan Islam adalah pendidikan yang membentuk manusia paripurna, yang keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawinya terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, kurikulum nasional tidak dapat berdiri netral nilai, melainkan harus menampung dan mempromosikan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan bangsa, termasuk nilai-nilai keislaman yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah pendidikan Indonesia.

Proses integrasi nilai Islam dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang kontekstual dan sistematis. *Pertama*, melalui pengembangan muatan lokal bernilai Islam, sekolah-sekolah dapat menyisipkan konten pembelajaran yang menggambarkan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam budaya lokal masyarakat, seperti praktik keagamaan, tradisi gotong royong, serta etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Muatan lokal ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengenali dan mencintai ajaran Islam dalam konteks lokalnya sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan membumi.

Kedua, integrasi dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan karakter berbasis akhlak, yang tidak hanya dilaksanakan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi juga menjadi semangat utama dalam seluruh aktivitas pendidikan, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Kurikulum harus dirancang untuk membentuk pribadi yang jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab, sebagaimana nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan utama pendidikan dalam Islam.

Ketiga, peran guru sebagai pendidik ruhaniyah (*spiritual educator*) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan internalisasi nilai. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai teladan dalam ucapan, perilaku, dan sikap sehari-hari. Keteladanan guru dalam beribadah, bersikap adil, santun, dan sabar menjadi model hidup nyata yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik secara

tidak langsung namun mendalam.

Keempat, integrasi nilai Islam juga dapat dilakukan melalui materi lintas mata pelajaran yang bersifat tauhid-sentris, yaitu pendekatan yang memandang semua ilmu sebagai manifestasi dari kebesaran dan keesaan Allah SWT. Konsep ini dapat diterapkan dalam pelajaran sains, matematika, sejarah, bahkan seni, dengan menunjukkan bagaimana ilmu tersebut membawa manusia pada kesadaran akan keteraturan alam semesta dan kebesaran Sang Pencipta (Zuhairini et al., 2011; Syamsuddin, 2020). Pendekatan ini akan melahirkan paradigma ilmiah yang tidak sekuler, tetapi berakar pada nilai spiritual dan tauhid.

Dengan demikian, integrasi nilai Islam dalam kurikulum nasional bukan hanya merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan Islam, melainkan menjadi komitmen nasional dalam membangun generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Jika diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, strategi ini akan memperkuat identitas nasional sekaligus memperkuat fondasi spiritual masyarakat Indonesia di tengah tantangan modernitas dan globalisasi

KESIMPULAN

Transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa mencerminkan dinamika sosial-politik dan arah pembangunan nasional yang senantiasa berubah. Sejak Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka, negara telah berupaya menyusun kerangka pendidikan yang adaptif terhadap tuntutan zaman, mulai dari orientasi kebangsaan, efisiensi teknokratik, pendekatan berbasis kompetensi, hingga pembelajaran yang fleksibel dan humanistik. Meskipun setiap perubahan kurikulum dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksiapan sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur pendidikan, dan lemahnya sistem monitoring serta evaluasi.

Dalam perspektif pendidikan Islam, transformasi kurikulum seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek akademik dan kompetensi teknis, tetapi juga harus menjamin hadirnya dimensi spiritual, moral, dan etika dalam seluruh proses pendidikan. Pendidikan Islam memandang kurikulum sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya (*insan kāmil*) yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum nasional merupakan keniscayaan, bukan hanya pada mata pelajaran agama, tetapi juga dalam seluruh aspek pembelajaran yang menyentuh akal, hati, dan perilaku peserta didik.

Melalui penguatan muatan lokal bernilai Islam, pendidikan karakter berbasis akhlak, keteladanan guru sebagai pendidik ruhaniyah, serta pendekatan lintas ilmu yang tauhid-sentris, pendidikan nasional dapat diarahkan menuju tujuan yang lebih holistik dan transformatif. Namun keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas pendidik, dan sistem pendukung yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan semua pemangku kepentingan untuk menjadikan kurikulum sebagai instrumen strategis dalam membangun generasi bangsa yang unggul secara intelektual, kuat secara spiritual, dan tangguh secara moral di tengah tantangan global

DAFTAR REFERENSI

- Al-Attas, S.M.N. (1980). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Amka, A. (2020). "Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013: Studi Kasus di Sekolah Menengah" Bandung: Alfabeta.
- Hadi, S. (2019). "Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Politik dan Kurikulum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 5(1), 45–58. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*,

11(1), 23–32.

Kemendikbudristek. (2021). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kosasih, E. (2021). “Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.” *Jurnal Inovasi Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Mulyasa, E. (2022). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bandung: Rosda.

Nurdin, E. (2020). “Kebijakan Kurikulum di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pendidik.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(2), 134–141. *Pendidikan*, 7(2), 65–73.

Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*.

Shihab, Quraish. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*

Syamsuddin, H. (2020). “Urgensi Nilai Spiritual dalam Kurikulum Pendidikan Islam.” *Jurnal Tarbiyatuna*, 13(1), 55–70.

Zuhairini, et al. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.